

Submitted: 01-05-2024

Accepted: 20-06-2024

Published: 30-06-2024

PERAN POLITIK GEREJA DALAM TAHUN POLITIK 2024: STUDI KASUS GKI SERPONG

THE POLITICAL ROLE OF THE CHURCH IN THE POLITICAL YEAR OF 2024: A CASE STUDY OF GKI SERPONG

Marfan Ferdinanda Tahamata,^{1*} Agus Supratikno¹

¹ Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*752023029@student.uksw.edu

ABSTRACT

The 2024 election is an important milestone in strengthening the foundations of democracy and social welfare. Socio-political participation in elections is very important to obtain a government that represents the interests of all society. The church plays an important role in guiding and shaping ethical perspectives and visions for society, especially Christians. The aim of this research is to discuss the role of the church in approaching the 2024 elections, with a focus on how the Church plays a positive role in supporting the democratic process. Several views of Indonesian theologians related to the relationship between church and state will be used in dissecting this article. Using qualitative case study methods the author will describe that the Indonesian Christian Church (GKI) Serpong has carried out its political role. This research found that GKI Serpong has educated its citizens but there is still a lack of presence from its citizens. Based on these findings, the main argument of this article is the importance of the role of the church in providing education to its citizens so that they can have political awareness so that they can use their voting rights/or voting rights in the 2024 elections.

Key phrases: church; politics; GKI Serpong.



ABSTRAK

Pemilu 2024 menjadi tonggak penting penguatan fondasi demokrasi dan kesejahteraan sosial. Partisipasi sosial politik dalam pemilu sangat penting untuk mendapatkan pemerintahan yang mewakili kepentingan semua masyarakat. Gereja memainkan peran penting dalam membimbing dan membentuk perspektif dan visi etis bagi masyarakat khususnya umat Kristiani. Tujuan penelitian ini akan membahas peran gereja menyongsong Pemilu 2024, dengan fokus pada bagaimana Gereja memainkan peran positif dalam mendukung proses demokrasi. Beberapa pandangan para teolog Indonesia yang terkait dengan hubungan antara gereja dan negara akan dipakai dalam membedah artikel ini. Menggunakan metode kualitatif studi kasus penulis akan mendeskripsikan bahwa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Serpong telah melakukan peran politisnya. Penelitian ini menemukan bahwa GKI Serpong telah mengedukasi warganya tapi masih kurang kehadiran dari warganya. Berdasarkan temuan tersebut maka argumentasi utama tulisan ini adalah pentingnya peran gereja untuk memberikan edukasi kepada warganya agar dapat memiliki kesadaran politik sehingga menggunakan hak pilih/atau hak suaranya pada Pemilu 2024.

Frasa kunci: gereja; politik; GKI Serpong

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 mendatang menjadi momen fundamental yang menentukan nasib bangsa. Dalam konteks ini, institusi sosial dan spiritual seperti gereja sangat berperan. Gereja dengan moral dan tradisinya mempunyai kekuatan yang besar untuk membimbing warga gereja dan membimbing masyarakat dalam proses pemilu. Garam dan terang dunia (Mat. 5:13-14) menjadi cara gereja hadir dalam dunia politik. Gereja menjalani perannya¹ sebagai institusi keagamaan yang terus mengupayakan sikap kritis agar gereja tetap eksis dalam merespons panggilan untuk menggarami dan menerangi dunia. Berpartisipasi dalam bidang politik menjadi sebuah panggilan bagi Gereja dalam karya pelayanannya sebagai warga negara demi mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui kesejahteraan yang diperjuangkan bagi sesama yang berakar dalam iman yang teguh, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab nabi Yeremia,

¹ David Ming, "Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang Baik di Indonesia," *JURNAL KADESI* 3, no. 2 (31 Juli 2021): 93, <https://doi.org/10.54765/cejurnalkadesi.v3i2.4>.

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (Yer. 29:7), sehingga dimana pun umat Allah berada, tidak memisahkan dirinya dari situasi sosial kemasyarakatan di mana ia berpijak.²

Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks pemilu, gereja mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan yang membawa warga gereja/negara pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab publik dan nilai-nilai demokrasi. Pentingnya upaya gereja untuk menghidupi panggilannya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, dimana warga negara/gereja mempunyai peranan penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara. Hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh seluruh warga negara. Hal tersebut menunjukkan partisipasi aktif dalam pembentukan pemerintahan dan mengambil keputusan yang menentukan nasib negara. Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi warga negara dan sekaligus warga Kerajaan Allah - Gereja untuk mengekspresikan pandangan politiknya melalui hak pilih.

Terkait artikel tentang peran politik gereja dalam menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah dilakukan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gatsper Anderius Lado tentang Pendidikan Gereja Untuk Meningkatkan Kemampuan Edukasi Jemaat Dalam Berpolitik.³ Gereja harus memberikan ajaran kepada jemaatnya di era politik. Para pendeta gereja harus memahami politik dan kepemimpinan yang alkitabiah. Tentu saja pendidikan politik bagi jemaah tidak hanya sepanjang tahun politik saja, namun jemaah Tuhan harus memiliki pola pikir yang benar dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Omedetho Jermias, Abdul Rahman, Muhammad Syukur, Firman Umar tentang sosialisasi Pentingnya Partisipasi Politik Terhadap Gerakan Pemuda

² Martalia Odi dan Intansakti Pius X, “Peran Gereja Dalam Memepersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 1, no. 4 (2024): 5, <https://doi.org/10.62200/magistra.v1i4.54>.

³ Gatsper Anderius Lado, “PENDIDIKAN GEREJA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EDUKASI JEMAAT DALAM BERPOLITIK,” *Inculco Journal of Christian Education* 4, no. 1 (19 Februari 2024): 88–106, <https://doi.org/10.59404/ijcc.v4i1.187>.

GPIB Bukit Zaitun Kota Makassar.⁴ Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari pemilih berusia muda maka kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, dengan menjadikan Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun sebagai mitra. Ketiga, penelitian dilakukan oleh Zakaria J. Ngelow tentang Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik di Indonesia.⁵ Sebuah studi sejarah tentang gereja dan politik di Barat dari zaman Perjanjian Baru hingga periode pasca-Reformasi, ketika gereja dan negara dipisahkan. Membahas tentang gereja dan politik di Indonesia. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Martalia Odi, tentang Peran Gereja Dalam Mempersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana upaya Gereja dalam mempersiapkan umat Katolik menghadapi pemilu 2024 dan mengkaji alasan mengapa umat Katolik enggan berpartisipasi dalam politik dan pekerjaan Gereja untuk mempersiapkan pemilu 2024.

Namun penelitian yang akan penulis lakukan, menekankan peran gereja untuk mengedukasi warga jemaat agar warga jemaat dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan pada tujuan edukasi yang dilakukan, sasaran edukasi pada usia 17 tahun sampai usia lanjut. Juga kepada yang sudah pernah menggunakan hak pilihnya sebagai penyegaran kembali maupun yang baru pertama agar menyadari perannya sehingga dapat menggunakan hak pilih/hak suaranya. Penulis melakukan penelitian studi kasus di jemaat GKI Serpong Tangerang Selatan Banten. Oleh karena itu, maka penelitian yang akan penulis lakukan dapat memberikan “novelty” atau kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan yang dikemukakan adalah metode kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mengacu pada sistem yang terikat atau masalah/berbagai masalah dari waktu ke waktu dengan mengumpulkan data mendalam dan

⁴ Emanuel Omedetho Jermias dkk., “Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Politik Terhadap Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun Kota Makassar,” *Jurnal Kabar Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 74–80, <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i4.975>.

⁵ Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2 Oktober 2014): 213, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

⁶ Martalia Odi dan Intansakti Pius X, “Peran Gereja Dalam Mempersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.”

menggabungkan berbagai sumber informasi yang kaya ke dalam konteks. Meskipun sistem ini terbatas dalam ruang dan waktu, namun kasus dapat dipelajari dari peristiwa, kegiatan atau individu.⁷ Periode dan kegiatan, proses, organisasi atau kelompok sosial. Mengumpulkan informasi rinci dan mendalam melalui berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu.

Adapun instrumen pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: dokumentasi, rekaman, wawancara, observasi langsung, observasi dan peralatan teknologi, alat atau instrument.⁸ Teknik pengumpulan data melalui observasi karena penulis bagian dari gereja yang menjadi tempat penelitian dan wawancara informan kunci empat orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN GEREJA DALAM POLITIK

Sikap Politik Yesus

Prinsip-prinsip politik yang dikembangkan Yesus⁹ melalui pengajaran-pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan yang diutarakan-Nya, seperti: prinsip pertama, prinsip pembawa damai. Yesus mengerti bahwa pengikut-Nya ada dalam penjajahan imperium Romawi, tetapi Ia tidak mengadakan perlawanan atau mengorganisasi perlawanan secara fisik. Ia justru memberikan pengajaran tentang pembawa damai seperti pada Matius 5:9 “berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”, artinya jika semua orang dapat menjadi pembawa damai, maka tidak ada penjajahan, tidak ada perang, yang ada kedamaian. Bahkan cara mempraktikkan bagaimana membawa damai itu Ia ajarkan dengan berkata “kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Mat. 5:44). Bukan hanya itu, Ia justru memberikan teladan ketika Ia dianiaya dan tersalib di kayu salib, Ia berkata, “ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk. 23:34). Prinsip yang kedua, adalah hidup dalam kebenaran. Pada pengajaran-Nya tentang kebenaran selalu bersangkut paut dengan terang, seperti pada Yohanes 3:21 “tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-

⁷ John W. Creswell dan John W. Creswell, *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches*, 2nd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007), 61.

⁸ Creswell dan Creswell, 37–38.

⁹ Alan Storkey, *Jesus and politics: confronting the powers* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005), 147–69.

perbuatannya dilakukan dalam Allah” tetapi barangsiapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak.” Di sini dapat terlihat bahwa kebenaran identik dengan perilaku hidup di dalam terang dan kejahatan identik dengan perilaku hidup jahat. Dengan prinsip tersebut, Yesus telah melakukan perlawanan bukan saja terhadap imperium Romawi tetapi juga terhadap kaum sebangsa-Nya yang melakukan kekerasan dan penindasan, namun perlawanan tersebut dilakukan dengan prinsip damai. Prinsip ketiga, prinsip yang lebih mengutamakan integritas daripada popularitas. Ketika Yesus telah banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat, dan banyak orang menjadi percaya, Ia tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka (Yoh. 2:24); bahkan Yesus menghindarkan diri dari orang-orang yang ingin memaksa-Nya menjadi raja (Yoh. 6:15). Yesus selalu melakukan perbuatan-Nya yang taat kepada Allah (integritas) daripada menerima pujian (popularitas), dengan demikian Ia terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Ada empat partai politik zaman Yesus.¹⁰ Pertama, partai Eseni, anggota masih lajang. Mereka tidak harus tentara, bekerja di pemerintahan, atau berdagang. Pekerjaan mereka di sawah dan perajin. Semua pendapatan digabungkan dengan milik bersama sehingga tidak ada milik pribadi. Ketika mereka berdoa, mereka berbeda dengan orang Yahudi yang memandang matahari dan Bait Allah. Mereka lebih memilih mengisolasi diri. Kedua, Sikiri atau partai Zelot. Kebanyakan dari mereka adalah perajin, bekerja di laut menangkap ikan, dan berdagang. Mereka membenci pemerintah kolonial dengan kekerasan. Mereka mengatakan menipu Tuhan jika membayar pajak. Ketiga, partai Saduki. Mereka adalah tuan tanah, ulama dan kehadiran mereka sebagai orang yang berpengaruh. Mereka sepakat, Romawi akan menunjuk seorang imam besar dan tentara Romawi akan mengawasi kebaikan Tuhan menggantikan kebebasan beribadah orang Yahudi. Keempat, partai Farisi. Mereka seorang akademisi, guru, pejabat pemerintah dan sarjana Taurat. Mereka menjadi polisi agama yang memastikan setiap orang mematuhi hukum, khususnya puasa, hari Sabat dan persepuluhan.

Yesus tidak memilih menjadi anggota suatu kelompok politik. Namun Yesus adalah seorang politisi. Yesus menunjukkan posisi politiknya ketika masyarakat mengajukan pertanyaan tentang benar jika membayar

¹⁰ A. Ismail dan Rika Uli Napitupulu-Simarangkir, *Selamat sehati: 33 renungan tentang sehati sepikir* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013).

pajak kepada penjahat. Jawaban Yesus: "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah (Mat. 22:21). Tampaknya jawaban Yesus adalah tentang membayar pajak, namun pertanyaan ini merupakan pertanyaan mendasar tentang hubungan antara agama dan negara. Lebih lanjut, jawaban Yesus menekankan dua kewajiban. Artinya, (1) "Apa yang berikan kepada kaisar? (2). "Apa yang diberikan kepada Tuhan. Posisi politik Yesus yang lain adalah sebagai berikut. "Kamu adalah garam dunia ... Kamu adalah terang dunia ini" (Mat. 5:13-14).¹¹ Yesus menegaskan untuk tidak meninggalkan dunia ini dan mengutus murid-muridnya untuk menjadi orang-orang yang membawa terang dan menggarami dunia. Sikap Yesus terhadap politik menjadi pedoman keterlibatan gereja dalam politik. Gereja bukan milik partai politik mana pun. Gereja tidak memaksa anggotanya untuk memilih partai politik mana pun. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan gereja adalah memberikan pendidikan politik kepada warganya melalui khotbah, seminar, pemahaman Alkitab dan pertemuan-pertemuan yang dirancang oleh kategori usia anak, remaja, pemuda, dewasa dan lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa gereja mempunyai kesadaran politik. Kesadaran politik lebih lanjut ditunjukkan dengan ikut pemilu sehingga berperan aktif menentukan kebijakan dalam mengatur negara dengan memilih pemimpin yang bersih dan benar serta tepat.

Prinsip-prinsip politik Yesus inilah yang seharusnya juga ada di dalam orang Kristen ketika mereka ada di dalam kancah perpolitikan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip politik yang demikian seharusnya diproduksi oleh gereja, agar orang Kristen dapat berperan dengan baik sesuai dengan teladan sikap Yesus dalam bernegara dan berpolitik di Indonesia.

Pandangan Para Teolog Tentang Peran Gereja di Indonesia

Pandangan Notohamidjojo

Menurut Notohamidjojo, pengakuan Gereja Kristen yang didasarkan pada Alkitab ketika memasuki dunia ini: "Kristus itu Tuhan merupakan suatu tindakan dan pengakuan politis. Tidak ada satu bidang kehidupan yang terkecuali dan terbatas kewibawaan Yesus Kristus".¹²

Bagi orang Kristen, lapangan politik yang kerap kali bergejolak, memerlukan hukum kasih Kristus untuk menentukan arah tujuan yang

¹¹ Ismail dan Napitupulu-Simarangkir, 132.

¹² O.Notohamijoyo, *Iman Kristen dan Politik* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972), 13.

tepat dan benar. Iman Kristen dan politik tidak boleh diceraikan. Orang Kristen wajib berpolitik karena bidang negara termasuk bidang yang perlu diperbaharui oleh Kristus.¹³ Notohamidjojo menegaskan bahwa gereja tidak boleh ingin menjadi negara. Negara tidak boleh ingin menjadi gereja. Panggilan bagi umat Kristen ialah berjuang untuk hubungan/relasi yang baik dan murni antara gereja dan negara di dunia ini.¹⁴

Gereja menyadari kehadirannya di dunia maka lahirlah pengakuan: “Kristus itu Tuhan”. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa Kristus yang disalibkan, mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Tuhan dan Juruselamat serta penebus hidup manusia dan dunia. Pengakuan tersebut dihidupi dalam kehidupan dengan menyatakan Kristus adalah Tuhan atas kehidupan manusia, kehidupan perkawinan dan keluarga, termasuk di dalam setiap jabatan dan pekerjaan manusia termasuk peran dalam dunia politik sehingga setiap orang Kristen berkewajiban untuk bersaksi kepada dunia bahwa “Kristus itu TUHAN.” Dalam kehidupan berpolitik pun gereja dan orang Kristen harus menyampaikan kesaksian kepada dunia bahwa “Kristus itu adalah TUHAN.”¹⁵

Pandangan Eka Darmaputera

Menurut Eka Darmaputera: baik secara etimologis maupun semantik, Gereja adalah orang-orangnya. Sebagaimana dikatakan dengan tepatnya oleh Martin Luther bahwa Gereja adalah sebuah kongregasi, sebuah komunitas. Intinya Gereja adalah sebuah persekutuan di dalam Kristus.¹⁶

Eka Darmaputera menulis esai di harian Sinar Harapan (8 Maret 1975) berjudul “Apakah Agama Berpolitik?” 27 tahun lalu, ia menelepon pihak gereja (baca: GKI SW Jawa Barat) untuk menunaikan misi sosialnya. Pada awal Orde Baru, setelah memenangkan pemilu tahun 1971, Eka sudah melihat bahayanya gereja menolak ikut berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mencari "keamanan" demi kepentingannya sendiri. Akibatnya, gereja kehilangan citra “baik, kritis, kreatif, dan benar”. Gereja lebih memilih untuk "mereformasi" pihak berwenang daripada bertindak sebagai nabi. Dua puluh empat tahun kemudian, pada tahun 1999, Eka menyesalkan bahwa Gereja telah mencapai titik terendah dalam sejarah. Dengan kata lain, Gereja telah kehilangan kepercayaan dan harga diri.

¹³ O.Notohamijoyo, 10–13.

¹⁴ O.Notohamijoyo, 170.

¹⁵ O.Notohamijoyo, 9.

¹⁶ R. Soedarmo, *Kamus istilah teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 30.

Selain itu, kehilangan rasa hormat dari masyarakat dan pihak berwenang. Faktanya, lebih baik bagi pihak berwenang untuk mengembangkan hubungan baik dengan kelompok lain yang lebih aman dalam jumlah dan kekuasaan. Itulah dunia politik. Oleh karena itu, kata Eka, agama Kristen menjadi rahmat dan pertolongan bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Berdasarkan temuan ini, kata Eka, ini adalah satu-satunya cara untuk lebih sadar dan ini harusnya masuk akal. Sungguh penyesuaian yang nyata berada di negara ini dan berada di tengah-tengah! Reformasi yang komprehensif, bukan setengah-setengah. Model tersebut harus bergerak dari kerangka ke kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan kelompok minoritas. Namun Eka menambahkan, berada di pihak minoritas bukan berarti menjadi oposisi. Namun, pengetahuan ini memungkinkan gereja mengetahui di pihak mana gereja harus berada. Selain itu, ia menegaskan, kerja sosial-sosio-politik gereja berbeda dengan partai politik. Panggilan gereja berbeda dengan panggilan partai politik. Tapi gereja menjadi gereja jika ia terus menjadi saksi hidup bagi Kristus sepanjang hidupnya.¹⁷

Pandangan A. Yewangoe

Andreas A. Yewangoe menegaskan: Hubungan antara Gereja dan Negara tidak mudah untuk dirumuskan. Sejarah membuktikan bahwa upaya untuk saling menguasai satu terhadap yang lainnya yang terjadi. Dalam kasus Gereja-Negara, Negara mendominasi Gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di dalam Gereja ditentukan oleh Negara. Sejak Konstantin Agung (4M) menjadi Kristen, kecenderungan Negara untuk ikut menentukan apa yang baik dan tidak baik. Di Indonesia khususnya pada zaman kolonial, kita juga menghadapi kasus yang serupa. Pemerintah kolonial Belanda antara lain menempatkan apa yang disebutnya “Commisarissen” di dalam majelis-majelis Jemaat ‘De Indische Kerk’, yang pada waktu itu merupakan Gereja-Negara, yang berfungsi sebagai yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara.¹⁸

Menurut Yewangoe, peran politik seseorang dapat dibedakan menjadi dua matra yang terkait satu dengan yang lain. Matra pertama adalah

¹⁷ Tim Warta GKI Gading Indah, “Di mana Posisi Gereja” (Jakarta, 25 Agustus 2002).

¹⁸ Weinata Sairin dan J. M. Pattiasina, *Hubungan gereja dan negara dan hak asasi manusia: bunga rampai pemikiran*, Cet. 1 (Jakarta, Ind[onesia]: BPK Gunung Mulia, 1994), 23.

menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara (polis).¹⁹ Polis adalah mengacu pada tempat di mana kehidupan bersama dapat dibina dan dipupuk, tetapi berarti pula suasana di mana setiap orang yang berkehendak baik dapat saling membina dan membangun dirinya masing-masing bagi kesejahteraan polis itu sendiri.²⁰ Secara sederhana, politik adalah keinginan bersama dalam membangun dan memelihara polis. Politik tidak dilihat sebagai suatu kenyataan demonis, tetapi dipandang sebagai kenyataan manusiawi. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk meniadakan hal-hal yang bersifat demonis, dan hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan Masyarakat.²¹ Tujuan polis juga menjamin masyarakat mendapatkan kebahagiaannya. Keterlibatan orang Kristen bukan hanya sebagai sikap ketaatan, tetapi kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam mempertahankan tata kehidupan Masyarakat.²² Kebenaran Firman Tuhan menjadi landasan dalam Yeremia 29:7. Upaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota adalah dengan mempertahankan tata kehidupan masyarakat. Yewangoe menyatakan bahwa, keterlibatan umat Kristiani dalam politik sebuah panggilan.²³ Mengenai aspek politik yang kedua/mantra kedua, Yewangoe menjelaskan sebagai berikut: Bentuk politik lainnya adalah kekuasaan. Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan tidaklah buruk jika digunakan untuk kebaikan rakyat. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana kebaikan bagi banyak orang. Umat Kristen yang ingin memperoleh kekuasaan boleh saja mencoba, namun mereka akan menggunakan sistem politik yang ada, seperti partai politik, untuk mengekspresikan kebutuhan mereka. Sikap politik dan ketundukan kepada pemerintah. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa kekuasaan dalam bentuk pemerintahan tidaklah buruk.

Berdasarkan pada pandangan ketiga tokoh tersebut diatas yang menegaskan hubungan gereja dan negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Gereja sangat penting untuk memahami kehadirannya yang menjalani tugas panggilan di dunia ini. Gereja tidak bisa mengatakan bahwa urusan gereja hanya dalam lingkup gereja dan penekanan hanya pada segi spiritualitas saja. Tapi gereja justru menjalankan tugas panggilannya di

¹⁹ Andreas, A Yewangoe dan Wenata Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpiban-serpiban pemikiran dipusaran kehidupan kekinian* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 95.

²⁰ A. A. Yewangoe, *Agama dan kerukunan*, Cet. 1 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 162.

²¹ Yewangoe, 164.

²² Yewangoe, 166.

²³ Yewangoe, 162.

tengah-tengah dunia ini, sehingga semua segi kehidupannya mencerminkan citra Kristus. Gereja/warga gereja berperan secara aktif di tengah – tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja yang dimaksudkan adalah orang-orangnya/warga gereja yang menjadi persekutuan dalam Kristus. Kesadaran yang demikian mengarahkan warga gereja untuk dapat menggunakan hak pilihnya/suaranya sebagai pernyataan peran yang aktif demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia.

Keterlibatan Gereja Dalam Politik

Ketika kekristenan membicarakan politik, maka akan muncul asumsi dan pertanyaan dan pernyataan ke permukaan bahwa, politik itu kotor. Saut Hamonangan Sirait menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap keterlibatan politik dan tidak mau mencampuri urusan politik karena memandang dunia yang kotor atau politik yang kotor.²⁴ Oleh sebab itu tidak patut orang Kristen terlibat dalam politik.

Gereja, pada intinya, dianggap sebagai komunitas suci yang terdiri dari individu- individu yang berbagi keinginan tak tergoyahkan untuk terlibat dalam tindakan ibadah untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Ini berfungsi jauh lebih dari sekadar ruang fisik di mana individu secara pasif mendengarkan khotbah dan menerima makanan spiritual; sebaliknya, itu adalah lingkungan dinamis yang mengundang partisipasi aktif dan pertukaran timbal balik. Gereja berfungsi sebagai manifestasi nyata dari keyakinan dan dedikasi yang mengakar dalam jemaat, melayani sebagai persekutuan yang memupuk pertumbuhan dalam iman dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menyebarkan pesan transformatif Yesus Kristus ke seluruh penjuru dunia.²⁵

Pemilu 2024 menandai sebuah periode penting dalam perjalanan demokrasi negara. Pada saat yang sama, perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, gereja, sebagai institusi sosial dan spiritual yang memiliki pengaruh besar, memegang peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat dalam menghadapi tantangan pemilu. Gereja sebagai pemegang nilai-nilai moral dan etika, memiliki kemampuan unik untuk membimbing masyarakat dalam menjalani proses pemilu. Ajaran moral gereja dapat menjadi pijakan yang

²⁴ Saut Hamonangan Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis*, Cet. 1 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 148.

²⁵ Martalia Odi dan Intansakti Pius X, “Peran Gereja Dalam Mempersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” 48.

kokoh bagi warga negara dalam mengambil keputusan politik yang berdampak besar.

Pemilu memiliki berfungsi untuk kemajuan sebuah negara:²⁶ Pertama, pemungutan suara merupakan inti demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya. Pemungutan suara memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka dan memilih perwakilan untuk kepentingan bersama dalam pemerintahan. Sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan politik yang komprehensif. Kedua, pemilu memberikan kesempatan warga negara untuk ikut/terlibat dan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik dapat membantu mendorong diskusi yang sehat mengenai isu-isu yang benar. Ketiga, Peluang untuk memilih orang-orang yang memiliki visi dan kualitas dalam kepemimpinan. Dengan cara ini kita dapat menghasilkan pemimpin yang lebih kuat dan mampu peduli terhadap masyarakat. Keempat, pemilu merupakan sarana untuk mempertimbangkan kinerja pemimpin terpilih. Jika yang terpilih tidak menepati janjinya atau kepemimpinannya lemah, maka rakyat mempunyai peluang untuk menggantikannya pada pemilu berikutnya. Ini mendorong para pemimpin untuk memenuhi tugas dan kebijakan mereka. Kelima, pemilu memberikan peluang bagi beragam kelompok dan komunitas untuk terwakili dalam pemerintahan. Penting untuk memahami dan menghormati bahasa dan perspektif yang berbeda. Keenam, pemilu merupakan sarana sah untuk menentukan pemimpin dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemungutan suara mengikat pemerintah terpilih. Pemerintah terpilih mempunyai kekuasaan yang kuat untuk merumuskan dan bertindak berdasarkan kebijakan yang dibutuhkan untuk pembangunan negara. Ketujuh, pemilu memberi peluang pada masyarakat untuk mengontrol proses politik dan pemilu.

Gereja memainkan peran penting dalam menyadarkan anggotanya menggunakan hak pilih/suara mereka.²⁷ Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) juga mewujudkan peran yang penting dalam menyerukan kepada semua gereja-gereja untuk menggunakan hak pilih/suaranya dan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin agar dapat bersikap yang benar dan

²⁶ Muhammad Ridha Iswardhana dkk., “Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda,” *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (30 Mei 2023): 148–49, <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014>.

²⁷ Saur Meilianti, “Pendidikan Kristiani dalam Membentuk Kesadaran Politik: Upaya Mendorong Partisipasi Politik dalam Prinsip Etis Teologis,” *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 139–47, <https://doi.org/10.52220/sikip.v3i2.92>.

jujur. Oleh sebab itu PGI mengeluarkan pesan pastoral untuk pemilu 2024 yang berbunyi:²⁸ Bagi jemaat Gereja yang ikut serta dalam kontestasi politik untuk negara dan untuk negara itu sendiri, kerja politik bukanlah tempat untuk mencari kekuasaan, melainkan cara untuk mengupayakan keadilan sosial. Jadilah kandidat yang cerdas! Raih kemenangan dengan cara yang tidak mempermalukan iman Kristen. Ini akan menjadi saksi yang baik bagi Kristus di hadapan masyarakat. Kepada gereja-gereja diingatkan bahwa Tuhan telah menempatkan mereka di kehidupan bangsa dan negara Indonesia, agar mereka tidak tinggal diam dan tidak berkonflik. Gereja dapat berdoa dan mengupayakan keselamatan umat ini (Lit. Yer 29:7) Menyongsong pemilu, Gereja diminta untuk tidak terikat pada salah satu kandidat utama, kandidat hukum atau kelompok elit. Anggota gereja mempunyai banyak pilihan dalam hal kepemimpinan dan calon sah, termasuk partai politik. Khusus kepada warga gereja yang sudah memungkinkan menggunakan hak pilihnya maka dihimbau supaya memiliki waktu sebelum pemilu untuk meneliti pendapat para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu dan partai politik yang mendukungnya. Daripada menutup mata terhadap kandidat dan partai yang tujuannya adalah kekuasaan, dukunglah mereka yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Fokus memilih orang-orang yang layak dan setia pada Konstitusi, Pancasila, dan UUD 45 serta mampu menjaga keutuhan NKRI. Kedua, jangan terpengaruh oleh visi, misi, atau janji kampanye kandidat yang terdengar manis. Jangan tergiur dengan citra media, karena kampanye iklan menunjukkan sisi terbaik dari kandidat pesaing. Sebaliknya, mereka mempelajari tindakan, sikap dan kebijakan mereka mengenai isu-isu penting nasional, sosial dan lingkungan yang akan menentukan pembangunan negara dalam lima tahun ke depan. Ketiga, menolak kegiatan keuangan dan politik bangsa, agama, suku dan golongan (SARA). Politik uang dan politik identitas menjadi kandidat yang tidak yakin akan kemampuannya. Setelah terpilih, mudah untuk menjadi seorang oportunis dengan niat jahat dan keserakahan. Keempat, menahan diri dari penipuan, fitnah dan pernyataan keliru, provokasi, intimidasi dan kata-kata kotor berdasarkan berbagai pilihan politik. Menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat dan kesatuan gereja. Para anggota Gereja dipanggil untuk membawa perdamaian, kedamaian Allah, kepada bangsa

²⁸ PGI, "Pesan Pastoral PGI unttuk Pemilu 2024. Sikap MPL PGI Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024 Dan Seruan Pastoral Kepada Segenap Umat Kristiani Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu 2024," 2024.

ini, bukan perpecahan. Kelima, harus ada kesempatan untuk ikut memantau dan memastikan pemilu dilaksanakan secara jujur. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi pemantau pemilu independen melalui berbagai situs pemantau pemilu. Salah satunya ada di website. Keenam, ingatlah bahwa saudara-saudari tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan panggilan nasional, namun juga dalam panggilan dan misi iman untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16).

Gereja Kristen Indonesia (GKI) menyadari perannya sehingga menyerukan melalui peran pastoral menyongsong pemilu 2024 dengan mengeluarkan pesan pastoral buat semua anggota dan simpatisan GKI sebagai berikut,²⁹ pertama, berdoa. Baik secara pribadi atau bersama-sama agar Tuhan memberkati bangsa Indonesia sekaligus menganugerahkan pemimpin terbaik untuk kebaikan Indonesia. Kedua, satu suara berharga. Ikut memberikan suara dalam pemilu ini. Dengan ikut memberikan suara maka kita ikut memilih pemimpin yang terbaik, sekaligus tidak membiarkan terpilihnya pemimpin yang tidak baik. Ketiga, teguh pada konstitusi. Memilih pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, juga berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semangat Bhineka Tunggal Ika. Keempat, cek rekam jejak. Memilih pemimpin yang takut kepada Tuhan, memiliki Integritas, rekam jejak yang baik dan tidak memiliki catatan buruk di masa sebelumnya serta taat kepada hukum dan aturan. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin yang berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya. Keenam, adil dan inovatif. Memilih pemimpin yang berpihak kepada yang miskin dan lemah serta memiliki kemauan berinovasi untuk kemajuan bangsa. Ketujuh, toleransi dan inklusif. Memilih pemimpin yang menjunjung tinggi martabat manusia, bersedia menerima segala perbedaan, merangkul semua golongan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Pentingnya peran gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam menyongsong pemilu 2024. Upaya menyerukan dengan tujuan kesadaran muncul yang akhirnya warga gereja yang menjadi bagian warga negara dapat menggunakan hak pilih/suaranya dengan baik, benar dan tepat. Kesadaran yang mengarahkan setiap warga bangsa/warga gereja menjalankan perannya dengan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mewujudkannya dalam pemilu 2024.

²⁹ BPMS GKI, “7 Pesan Pastoral BPMS GKI Untuk Pemilu 2024,” 2024.

Peran Politik GKI Serpong Dalam Menyongsong Pemilu 2024

Pendidikan dan politik mempunyai keterkaitan yang sangat erat.³⁰ Politik dan pendidikan saling terkait erat karena masyarakat tidak mengharapkan pemimpin yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan pemerintahan dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Politik tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, sehingga tidak bisa dihindari atau ditinggalkan. Politik bukanlah konteks kekuasaan, melainkan cara mengorganisir seluruh lingkungan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab warga negara/umat beragama untuk membedakan antara politik yang bermanfaat dan yang merugikan.³¹ Pendidikan politik di gereja memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi pemilu 2024, di mana pengetahuan dan keterlibatan warga jemaat dapat membentuk pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan politik di gereja dapat menjadi sumber informasi yang objektif dan terpercaya. Gereja dapat menyelenggarakan forum diskusi, seminar, atau penyuluhan yang memberikan warganya pemahaman mendalam tentang platform dan program kandidat, isu-isu krusial, serta mekanisme pemilu.

Pendidikan politik di gereja dapat mendorong dialog kritis dan berpikir analitis. Warga jemaat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan evaluasi terhadap informasi politik, membedakan fakta dan opini, serta mengambil keputusan yang informasional dan rasional. Melalui pendidikan politik di gereja, diharapkan warga gereja dapat tumbuh sebagai pemilih yang terdidik dan terinformasi, yang secara positif memengaruhi proses pemilihan umum 2024 dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab.

Agus Supratikno menyatakan bahwa: Penting untuk di sadari bahwa,³² Setiap orang yang terjun dalam politik wajib memahami bukan hanya pengetahuan tetapi juga karakter kepribadian yang menghargai kewibawaan negara, pribadi, norma sosial dan hukum, norma keadilan dan kemanusiaan, yang hanya bisa ditaati jika seseorang taat dan percaya Allah. Bagi orang Kristen lapangan politik memerlukan hukum dan kasih Kristus untuk menentukan arah dan jalannya. Pemerintah dan warga negara wajib

³⁰ Dessi Asdrayany dkk., "Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan," *Journal On Education* 6, no. 1 (2023).

³¹ Fakhry Firmanto dan Wilken Rezki Abadi, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 23, <https://doi.org/10.37985/themis.v1i1.329>.

³² Agus Supraktikno, "Gereja dan Politik" (Bahan Ajar Kelas Agama dan Politik, Salatiga, 12 Januari 2024).

taat kepada hukum dan keadilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik.

GKI Serpong sangat menyadari peran politisnya untuk mengambil bagian secara aktif dalam memberikan edukasi menyongsong pemilu 2024. Merujuk pada pandangan O Notohamijoyo, “Kristus itu adalah TUHAN”,³³ menegaskan kehadiran umat Kristiani dalam dunia ini dalam bidang apapun menjadi garam dan terang, termasuk dalam bidang politik. Sejalan dengan pandangan tersebut penegasan dinyatakan Saut Hamonangan Sirait³⁴ bahwa: “baik secara bersama-sama maupun perseorangan harus berupaya, berjerih dan berjuang bagi terwujudnya tatanan politik yang mencitrakan Kerajaan Allah. Gereja berkewajiban untuk mempersiapkan /mendedukasi anggotanya agar mereka dapat berpartisipasi dengan sabar dan dengan penuh tanggung jawab dalam bidang politik. Pemahaman lebih lanjut bahwa Gereja adalah orang-orangnya sebagai suatu komunitas dan persekutuan dalam Kristus yang berperan secara sadar akan upaya mengoptimalkan perannya dalam kehidupan sebagai warga negara. Menjalani kehidupan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan seperti yang ditegaskan oleh Eka Darmaputera dan penegasan Yewangoe bahwa mewujudkan panggilan secara nyata dalam kehidupan sebagai umat Kristiani di tengah-tengah dunia, khususnya bangsa Indonesia.

Menghidupi kesadaran akan peran untuk mendedukasi warga jemaat dengan tujuan kesadaran warga jemaat dalam menggunakan hak pilih/suaranya dapat terwujud. Mencapai hal tersebut maka dirancanglah dan dilakukan edukasi menjelang pemilu 2024 oleh GKI Serpong. Mengenal sekilas jemaat GKI Serpong. GKI Serpong terletak di Tangerang Selatan, Banten. Data jemaat per Mei 2023 berjumlah 6167 jiwa.³⁵ Berdasarkan data jemaat dapat terlihat usia yang telah memiliki hak pilih kurang lebih berjumlah 4461 jiwa dari usia 17 tahun hingga lanjut usia (Lansia).

Menyongsong pemilu di tahun 2024, Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan GKI Serpong terpanggil untuk mendedukasi jemaat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Memberi informasi seputar pelaksanaan pemilu bagi jemaat yang baru pertama kali memilih dan menyegarkan kembali informasi bagi jemaat yang sudah pernah memilih.

³³ O.Notohamijoyo, *Iman Kristen dan Politik*, 9.

³⁴ Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, 156.

³⁵ AS, 14 September 2023.

Edukasi mengenai pemilu tidak hanya dibahas dari sisi hukum saja tetapi juga dari sisi teologis. Pelaksanaan pada Sabtu, 4 November 2023. Pukul 10.00 – 13.00 WIB. Target peserta 500 orang yang merupakan jemaat dengan hak pilih (usia 17 tahun hingga lansia). Menjelang edukasi tersebut dilakukan persiapan: Pertemuan online antara panitia dan pembicara untuk mendiskusikan materi yang akan dibawakan oleh masing-masing pembicara supaya ada kesinambungan dan batasan mengenai topik yang dibahas. Sosialisasi edukasi melalui spanduk, Xbanner dan *broadcast message* ke grup-grup wilayah Gereja X. Sosialisasi melalui komisi remaja, komisi pemuda, komisi lansia, dan komisi dewasa. Penayangan video promosi selama tiga minggu berturut-turut dengan tiga tema video yang berbeda. Pembukaan pendaftaran sekaligus dibukanya kolom pertanyaan bagi peserta.³⁶ Pendaftaran melalui Google Form sejumlah 83 orang yang dikategorikan berdasarkan wilayah pelayanan.³⁷

Pada hari H, edukasi di mulai dari penjelasan segi hukum pemilu. Disampaikan landasan menggunakan hak pilih berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara normatif yang merujuk pada Pasal 28 C ayat (2) UUD Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28 D ayat (3) UUD Tahun 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan.

HAM dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. HAM secara lahiriah ada dalam diri setiap orang Indonesia dan merupakan kekuatan bagi setiap orang. HAM sebagai kekuatan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aktualisasi HAM dapat dilihat dari banyaknya orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sebagai hak asasi untuk dipilih dan adanya beberapa orang yang dicalonkan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Sebagai rakyat indonesia setiap orang mempunyai hak untuk memilih orang atau memilih pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilu setiap lima tahun. Orang yang mencalonkan dirinya sebagai bakal calon legislatif

³⁶ LM, 20 Januari 2024.

³⁷ LM, 20 Januari 2024.

menampilkan identitas dari dirinya sendiri, yang disebut sebagai politik identitas. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, juga menampilkan identitas dari dirinya sendiri dan pasangannya. Edukasi selanjutnya dari tenaga ahli KPU dengan mengarahkan untuk menjadi pemilih yang cerdas, mempersiapkan diri untuk menggunakan hak pilih, menginformasikan sistem informasi yang dapat digunakan. Di akhir edukasi dari segi teologis³⁸ dengan menyampaikan bahwa gereja harus memberikan edukasi kepada warganya, kritis dalam memilih, tidak boleh kampanye di gereja dan *enjoy* dalam berpolitik serta perjalanan berpolitik dalam Alkitab dan kepemimpinan Kristen.

Respons dari jemaat sangat antusias dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:³⁹

1. Sebagai WNI dan umat Kristen, bagaimana memilih pemimpin seperti yang saya butuhkan?
2. Bolehkah seorang Kristen berpolitik praktis?
3. Bagaimana cara memilih pemimpin Kristen yg tepat.
4. Apakah bincang-bincang ini memberi masukan bagi peserta secara pribadi untuk dapat memilih wakil rakyat yang tepat?
5. Mengingat, gereja tidak diperbolehkan mengarahkan secara langsung pada caleg tertentu.
6. Sejauh mana aturan di rumah ibadah, sekolah dan kantor pemerintahan mengenai kampanye?
7. Apakah sudah waktunya negara dipimpin generasi muda?
8. Dalam pemilu nanti bagaimana cara memilih wakil rakyat yang benar-benar mau bekerja? Tips memilih calon legislatif.
9. Saya baru pindah ke Tangerang selatan bulan oktober 2023, saat memeriksa di data pemilih masih tercatat di Jakarta. Bagaimana cara mengubah menjadi sesuai domisili sekarang?
10. Bagaimana KPU menyosialisasikan di lapangan (melalui RT) dan menjadikannya sebagai agenda kerja mengenai caleg yang terlibat kasus korupsi (dapat diberi track record caleg yang bersangkutan) mengingat media sosial dan hasil survey lembaga survey yg tidak dapat diandalkan sepenuhnya.
11. Mohon penjelasan mengenai kertas suara.
12. Bagaimana proses penyaringan calon wakil rakyat selama ini?

³⁸ BA, "Pemilu, Politik, Citra Indonesia" (Jakarta, 4 November 2023).

³⁹ LM, 20 Januari 2024.

Setelah selesai edukasi, panitia pelaksanaan dan Majelis Jemaat melakukan evaluasi.⁴⁰ Hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Jumlah peserta tidak mencapai target walau sosialisasi sudah dilakukan maksimal dan jauh hari sebelum acara.
2. Minimnya kehadiran jemaat di sebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.
3. Jemaat tereduksi bagaimana sebagai orang Kristen harus menggunakan suara kita.
4. Jemaat memperoleh gambaran, hak pilih yang disampaikan adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di tingkat apa saja, selain pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
5. Edukasi yang dilakukan salah satunya untuk pemilih pemula telah tereduksi agar menggunakan hak pilihnya.
6. Para narasumber telah memberikan edukasi dengan baik. Dari segi hukum, info KPU dan segi teologis, menyadarkan jemaat agar jangan Golput tapi dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat dan benar.

GKI Serpong telah menjalani peran politisnya dengan melaksanakan edukasi menyongsong Pemilu 2024. Pengakuan Kristus adalah Tuhan dalam semua bidang kehidupan termasuk bidang politik (pandangan O Notohamijoyo). Mewujudkan panggilan tersebut dalam kehidupan kesaksian (pandangan Eka Darmaputera) sehingga membuktikan bahwa GKI Serpong telah menunaikan tugas panggilannya (pandangan Andreas A. Yewangoe). Antusias jemaat yang hadir untuk mengetahui bagaimana supaya tepat dalam menggunakan hak pilih. Walaupun dalam evaluasi setelah edukasi diselenggarakan, dijumpai bahwa salah satu respons dari warga jemaat masih kurang jika dibanding dengan jumlah jemaat GKI Serpong.

KESIMPULAN

Peran gereja dalam menyongsong Pemilu 2024 sangat penting dan vital. Di satu sisi gereja memiliki peran dalam membangun kehidupan demokrasi negara. Di sisi yang lain setiap warga gereja yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sangat penting untuk menyadari peran pentingnya agar dapat menggunakan dengan tepat. Sikap politik Yesus yang menjadi teladan dalam menjalankan peran gereja dalam bidang politik. Tiga tokoh teolog di Indonesia yang telah memberikan pandangan terkait peran gereja di tengah-

⁴⁰ SH, 20 Januari 2024.

tengah politik dan negara. Justru gereja harus berperan dalam mewujudkan relasi yang menyatakan tanda-tanda Kerajaan Allah. Peran gereja dalam politik, di pahami sebagai panggilan yang dijalani gereja/warga gereja untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan.

Berperan di bidang politik menjadi sebuah panggilan bagi Gereja/warga gereja dalam karya pelayanannya sebagai warga negara demi mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui terwujudnya kesejahteraan yang diperjuangkan bagi sesama yang berakar dalam iman. Melalui hal ini dapat dikatakan bahwa gereja/warga gereja tidak bisa memisahkan peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam perkembangan dunia. Usaha Gereja dalam mempersiapkan warga gereja menyongsong pemilu 2024 adalah: *Pertama*, Melalui Pendidikan Politik; *Kedua*, Membangun kesadaran umat bahwa bidang politik merupakan panggilan; *Ketiga*, melalui seminar; *Keempat*, Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Realita yang terjadi bahwa GKI Serpong telah menjalankan sikap politisnya. Walaupun saat edukasi pemilu yang lakukan oleh GKI Serpong ternyata respons warga gereja sangat minim. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran jemaat dengan berbagai alasan, misalnya karena beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan realita yang telah terjadi maka beberapa saran agar GKI Serpong ke depan dapat membuat program pendidikan politik secara bertahap untuk setiap kategori usia. Melalui ibadah dan seminar serta diskusi yang dirancang dengan kreatif agar dapat memberikan edukasi yang tepat. Menjelang pemilu dapat menyelenggarakan ibadah dengan tema-tema terkait peran jemaat sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berharap dengan upaya tersebut menegaskan bahwa gereja peduli pada politik dan negara sehingga mendorong warga gereja juga memiliki sikap peduli dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Supraktikno. "Gereja dan Politik." Bahan Ajar Kelas Agama dan Politik. Salatiga, 12 Januari 2024.

Andreas, A Yewangoe dan Wenata Sairin. *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

AS, 14 September 2023.

BA. "Pemilu, Politik, Citra Indonesia." Jakarta, 4 November 2023.



BPMS GKI. “7 Pesan Pastoral BPMS GKI Untuk Pemilu 2024,” 2024.

Creswell, John W., dan John W. Creswell. *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2007.

Dessi Asdrayany, Muhamad Najmi Muhajir, Anis Fauzi, dan Ahmad Qurtubi. “Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan.” *Journal On Education* 6, no. 1 (2023).

Emanuel Omedetho Jermias, Abdul Rahman, Muhammad Syukur, dan Firman Umar. “Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Politik Terhadap Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun Kota Makassar.” *Jurnal Kabar Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 74–80. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i4.975>.

Fakhry Firmanto dan Wilken Rezki Abadi. “Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 21–25. <https://doi.org/10.37985/themis.v1i1.329>.

Ismail, A., dan Rika Uli Napitupulu-Simarangkir. *Selamat sehati: 33 renungan tentang sehati sepikir*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.

Iswardhana, Muhammad Ridha, Maʼulillahi Zakinah, Gita Ardyah Maharani, Widia Grace Tayan, dan Adinia Nuraini. “Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda.” *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (30 Mei 2023): 117–22. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014>.

Lado, Gatsper Anderius. “PENDIDIKAN GEREJA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EDUKASI JEMAAT DALAM BERPOLITIK.” *Inculco Journal of Christian Education* 4, no. 1 (19 Februari 2024): 88–106. <https://doi.org/10.59404/ijce.v4i1.187>.

LM, 20 Januari 2024.

———, 20 Januari 2024.

Martalia Odi dan Intansakti Pius X. “Peran Gereja Dalam Memepersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 1, no. 4 (2024): 47–56. <https://doi.org/10.62200/magistra.v1i4.54>.

- Ming, David. "Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang Baik di Indonesia." *JURNAL KADESI* 3, no. 2 (31 Juli 2021): 85–103. <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.4>.
- Ngelow, Zakaria J. "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2 Oktober 2014): 213. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- O. Notohamijoyo. *Iman Kristen dan Politik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972.
- PGI. "Pesan Pastoral PGI unttuk Pemilu 2024. Sikap MPL PGI Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024 Dan Seruan Pastoral Kepada Segenap Umat Kristiani Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu 2024," 2024.
- Sairin, Weinata, dan J. M. Pattiasina. *Hubungan gereja dan negara dan hak asasi manusia: bunga rampai pemikiran*. Cet. 1. Jakarta, Ind[onesia]: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Saur Meilianti. "Pendidikan Kristiani dalam Membentuk Kesadaran Politik: Upaya Mendorong Partisipasi Politik dalam Prinsip Etis Teologis." *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 139–47. <https://doi.org/10.52220/sikip.v3i2.92>.
- SH, 20 Januari 2024.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Soedarmo, R. *Kamus istilah teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Storkey, Alan. *Jesus and politics: confronting the powers*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005.
- Tim Warta GKI Gading Indah. "Di mana Posisi Gereja." Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Yewangoe, A. A. *Agama dan kerukunan*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.